

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor pajak mendapatkan perhatian yang luas dalam beberapa tahun terakhir ini. Peran pajak dalam APBN semakin meningkat membuat pemerintah harus membuat berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak, sehingga keuangan negara senantiasa dalam kondisi sehat untuk itu, peran dan dukungan masyarakat sangatlah penting untuk menjangkau terselenggaranya pembangunan di segala sektor.

Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang dianggap aman dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya yang signifikan yang dapat mendorong meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pada setiap tahunnya. Penerimaan negara disektor pajak masih tetap merupakan pemasukan dana yang potensial. Dan menjanjikan serta sangat menguntungkan negara dalam hal untuk memenuhi pembiayaan dalam negeri.

Penerimaan sektor pajak ini hanya dapat berjalan dengan baik dan lancar hanya jika pengawasan yang dilakukan dan diterapkan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak tersebut dapat berjalan dengan efektif meskipun saat ini pemerintah telah memberlakukan *system self assessment* yang berarti Wajib Pajak diperbolehkan untuk menghitung sendiri besarnya utang pajak

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebelum dilaporkan dan disetorkan kepada fiskus.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak ditujukan dengan maksud untuk ketertiban dan kelancaran administrasi perpajakan sehingga pada saat melakukan penyetoran dan pelaporan pajak data dan informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sama dengan data dan informasi yang ada di kantor pelayanan pajak.

Dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan fiskus harus dapat mengkategorikan pajak penghasilan sebagai pajak subjektif dengan pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkat atau mendasarkan pada subjek pelakunya. Undang-undang pajak penghasilan dilakukan oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan sebagai peran serta masyarakat dalam negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional, merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis memilih judul **“Evaluasi Pengawasan Pembayaran PPh pasal 25 Wajib Pajak badan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Selatan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis dapat merumuskan bebarapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan PPh (PPh) Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan.
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dalam menerapkan mekanisme pengawasan yang telah diterapkan dan cara mengatasinya.
3. Bagaimana pengaruh mekanisme pengawasan pembayaran yang dilakukan oleh KPP terhadap penerimaan pajak di Pratama Bekasi Selatan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam skripsi ini penulis membatasi permasalahan hanya pada pengawasan terhadap pembayaran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan.

D. Hipotesis

Adalah merupakan suatu pernyataan, konsep atau kesimpulan yang sifatnya sementara mengenai fenomena yang sedang diamati berdasarkan apa yang telah

diketahui sebelumnya. Kebenaran dari hipotesis ini akan diketahui apabila proses penelitian telah dilakukan dengan lengkap. Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis membuat hipotesis : Mekanisme Pengawasan terhadap Pembayaran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan yang Diterapkan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak pada KPP tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang mekanisme pengawasan pembayaran terhadap PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan yang diterapkan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada KPP tersebut.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan tersebut sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP dalam penerapannya.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pengawasan pembayaran terhadap PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan yang diterapkan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada KPP tersebut.

2. Untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pengawasan tersebut sehubungan dengan kendala yang dihadapi oleh KPP dalam penerapannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang penyusunannya dilakukan secara sistematis dimana pembahasan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi.

Secara ringkas penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian judul, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai dasar teori yang digunakan penulis sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, seperti konsep dasar perpajakan, pembahasan mengenai PPh Pasal 25 dan pelaporannya, surat tagihan pajak, pengawasan dan administrasi pembayaran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Bekasi Selatan, serta pembahasan mengenai penerimaan pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, mekanisme pengawasan dan pembayaran pajak PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan yang diterapkan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan, kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dalam penerapan mekanisme pengawasan terhadap pembayaran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan dan cara mengatasinya, pengaruh pengawasan pembayaran tersebut terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Selatan, serta analisis pengaruh pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Bekasi Selatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya.